



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 252A/KEP/BSN/10/2015

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015 - 2019  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 22A/KEP/BSN/2/2013 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun dan ditetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Nasional 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Keputusan...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2015-2019.

PERTAMA : Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Nasional 2015-2019 yang selanjutnya disebut Road Map RB BSN 2015-2019 digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

KEDUA ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

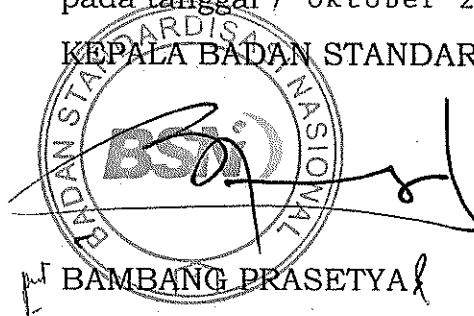
- 3 -

- KEDUA : Road Map RB BSN 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Road Map RB BSN 2015-2019 berada di bawah koordinasi Sekretaris Utama dibantu oleh para Deputi dan Eselon II di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Road Map RB BSN dibentuk Kelompok Kerja (POKJA).
- KELIMA : Dalam melaksanakan Road Map RB BSN 2015-2019 dibantu oleh Sekretariat Road Map RB BSN secara *ex Officio* berada di Biro Hukum, Organisasi dan Humas cq. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Oktober 2015

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Utama BSN;
2. Para Deputi di lingkungan BSN;
3. Kepala Inspektorat BSN;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan BSN;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2015 – 2019

**A. HASIL YANG DIHARAPKAN**

No.	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Pola pikir dan Budaya Kerja Pegawai ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar kode etik, dan kode perilaku ASN. Termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan;</li> <li>- Meningkatkan peraturan perundang-undangan yang sederhana, efektif, efisien, harmonis dan tidak tumpang tindih untuk mendorong iklim kondusif bagi publik</li> </ul>
2.	Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik</li> </ul>
3.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional;</li> <li>- Meningkatkan ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Lembaga Non Struktural;</li> </ul>

7.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis</li> <li>- Meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</li> <li>- Meningkatkan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi</li> </ul>
8.	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan public sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat</li> <li>- Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik</li> </ul>

**B. RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM PROGRAM REFORMASI BIROKRASI**

**I. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN**

No.	Kegiatan	Tahun					Penanggung Jawab
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Perumusan kebijakan dan pencanangan budaya kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai-nilai organisasi,</li> <li>- Sistem Integritas Nasional,</li> <li>- 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin),</li> <li>- Hemat energi dan air</li> </ul>	✓	✓				1. Kelompok Kerja I 2. Biro Hukum, Organisasi dan Humas
2.	Implementasi Budaya Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	

No.	Kegiatan	Tahun				Penanggung Jawab
		2015	2016	2017	2018	
3.	Public Campaign melalui penyusunan sistem dan mekanisme peran masyarakat sebagai pengawas	✓				
4.	Revolusi Mental Aparatur, diantaranya: - Penggunaan produk dalam negeri (baik dalam kegiatan dinas maupun keseharian)	✓	✓	✓	✓	✓

## II. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN ASN

No.	Kegiatan	Tahun					Penanggung Jawab
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Perumusan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN		✓	✓			1. Kelompok Kerja I 2. Biro Hukum, Organisasi dan Humas
2.	Perumusan kebijakan <i>reward and punishment</i> berbasis kinerja		✓	✓			
3.	Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan pegawai BSN	✓	✓	✓			
4.	Sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi	✓					
5.	Penataan dan penyegaran pegawai (pola karir, rotasi dan mutasi, tindak lanjut <i>assessment center</i> )	✓	✓	✓	✓	✓	

No.	Kegiatan	Tahun					Penanggung Jawab
		2015	2016	2017	2018	2019	
6.	Sistem promosi secara terbuka	✓	✓	✓	✓	✓	
7.	Penilaian kinerja pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	
8.	Penyusunan pedoman sistem dan pengendalian pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	✓	✓				
9.	Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai	✓	✓	✓			
10.	Menyusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi		✓				
11.	Melakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar/ seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi		✓	✓	✓	✓	
12.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem pelaksanaan diklat berbasis kompetensi		✓	✓	✓	✓	
13.	Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓	

No.	Kegiatan	Tahun				Penanggung Jawab	
		2015	2016	2017	2018		2019
14.	Memastikan hasil penilaian kinerja individu dijasikan dasar untuk pengembangan karir		✓	✓	✓	✓	
15.	Memastikan capaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai			✓	✓	✓	
16.	Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 secara konsisten		✓	✓	✓	✓	
17.	Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi	✓	✓	✓	✓	✓	

### III. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

No.	Kegiatan	Tahun				Penanggung Jawab	
		2015	2016	2017	2018		2019
1.	Penataan tugas, fungsi dan kewenangan dan penyesuaian struktur organisasi BSN	✓	✓	✓			
2.	Perumusan kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan BSN dibidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	✓	✓	✓			1. Kelompok Kerja I 2. Biro Hukum, Organisasi dan Humas
3.	Penguatan sinergi kelembagaan bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	✓	✓	✓			



IV. PENGUATAN TATA LAKSANA

No.	Kegiatan	Tahun					Penanggung Jawab
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	<p>Penerapan <i>e-Government</i> yang terintegrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan program, monitoring dan evaluasi kinerja</li> <li>- Sistem keuangan</li> <li>- Layanan kepegawaian</li> <li>- Layanan ketatausahaan rumah tangga</li> <li>- Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok Kerja I</li> <li>2. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha</li> <li>3. Biro Hukum, Organisasi dan Humas</li> </ol>
2.	Mempertahankan dan meningkatkan penerapan SNI ISO 9001 dan sertifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	
3.	Peningkatan pengelolaan informasi publik	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	Penerapan sistem kearsipan yang handal dan tata naskah dinas (Tata Naskah Dinas Elektronik)	✓	✓	✓	✓	✓	

V. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Kegiatan	Tahun					Penanggung Jawab
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Perumusan kebijakan yang mendukung fokus-fokus Nawacita: 6 sektor prioritas standarisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN	✓	✓	✓	✓	✓	
2.	Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan	✓	✓	✓	✓	✓	
3.	Tindak lanjut hasil identifikasi peraturan perundang-undangan terkait Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang tidak harmonis	✓	✓	✓			1. Kelompok Kerja II 2. Biro Hukum, Organisasi dan Humas
4.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong partisipasi publik dalam perumusan kebijakan	✓	✓	✓	✓	✓	

V. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Kegiatan	Tahun				Penanggung Jawab	
		2015	2016	2017	2018		2019
1.	Perumusan kebijakan yang mendukung fokus-fokus Nawacita: 6 sektor prioritas standarisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung Masyarakat Ekonomi ASEAN	✓	✓	✓	✓	✓	
2.	Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan	✓	✓	✓	✓	✓	1. Kelompok Kerja II 2. Biro Hukum, Organisasi dan Humas
3.	Tindak lanjut hasil identifikasi peraturan perundang-undangan terkait Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yang tidak harmonis	✓	✓	✓			
4.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong partisipasi publik dalam perumusan kebijakan	✓	✓	✓	✓	✓	

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

No.	Kegiatan	Tahun					Penanggung Jawab
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Perumusan dan penerapan Standar Pelayanan Minimum	✓					
2.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk penerapan pelayanan satu pintu	✓					
3.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong percepatan waktu pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	✓	1. Kelompok Kerja II 2. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi 3. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi 4. Pusat Informasi dan Dokumentasi 5. Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 6. Pusat Kerjasama Standardisasi
4.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
5.	Membangun dan mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi	✓	✓	✓	✓	✓	
6.	Pembuatan inovasi layanan (per tahun minimal 1 inovasi layanan)	✓	✓	✓	✓	✓	
7.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong partisipasi akademisi, bisnis, <i>government</i> (ABG) dalam penyediaan pelayanan publik	✓	✓				

8.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	✓							
9.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk monitoring dan evaluasi pelayanan publik	✓							
VII. VIII. 10.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Optimalisasi pemanfaatan dan PNPB untuk pemberian kompensasi kepada penerima layanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong penguatan peran inspektorat dalam pengendalian kualitas pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VII. AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Kegiatan	Tahun					Penanggung Jawab
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong harmonisasi dan penguatan sistem manajemen kinerja BSN	✓	✓	✓			
2.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong sinergi penerapan sistem manajemen kinerja melalui penetapan indicator kinerja BSN	✓	✓	✓	✓	✓	
3.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong peningkatan sinergi sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BSN	✓	✓	✓	✓	✓	1. Kelompok Kerja III 2. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha
4.	Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem <i>reward and punishment</i> dalam penerapan manajemen kinerja BSN	✓	✓	✓	✓	✓	
5.	Perumusan dan penetapan kebijakan optimalisasi penerapan <i>e-Government</i> terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen kinerja BSN	✓	✓	✓	✓	✓	

6.	Perumusan dan penetapan kebijakan pemantapan SAKIP untuk mendorong peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya	✓	✓					
7.	Perumusan Kebijakan mengenai evaluasi kinerja	✓						
8.	Perumusan Kebijakan mengenai pengukuran kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	✓						

#### VIII. PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

No.	Kegiatan	Tahun					Penanggung Jawab
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Perumusan kebijakan SPIP	✓					1. Kelompok Kerja III 2. Inspektorat
2.	Perumusan kebijakan untuk mendorong independensi APIP	✓					
3.	Peningkatan jumlah dan kompetensi Auditor	✓	✓	✓	✓	✓	
4.	Perumusan kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan internal, eksternal, masyarakat, dan penegakan hukum.			✓	✓	✓	

5.	Perumusan kebijakan untuk mendorong peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan	✓	✓	✓			
6.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif		✓				
7.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong penyusunan rencana pengawasan internasional terpadu dan terfokus				✓	✓	
8.	Perumusan Kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan KKN, seperti <i>whistle blowing system</i> , penanganan gratifikasi, pengaturan konflik kepentingan	✓		✓			

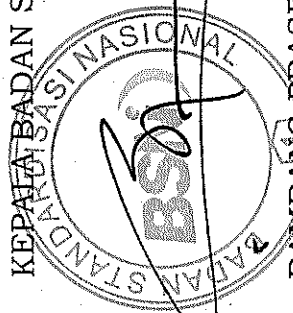
#### IX. QUICK WINS

No.	Prioritas 2015	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya layanan 1 Pintu untuk Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan isi layanan: - Layanan SNI - Layanan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok Kerja II</li> <li>2. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi</li> <li>3. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi</li> <li>4. Pusat Informasi dan Dokumentasi</li> <li>5. Pusat Pendidikan dan Pemasarakan Standardisasi</li> </ol>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Diklat</li> <li>- Layanan Issuer Identification Number (IIN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Pusat Kerjasama Standardisasi</li> <li>7. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha</li> </ul>
2.	Terwujudnya Sistem Monitoring Pengembangan SNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok Kerja I</li> <li>2. Pusat Informasi dan Dokumentasi</li> <li>3. Pusat Pusat Perumusan Standar</li> </ul>

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA *sp*